

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 17.500 pulau dan garis pantai sepanjang 104 ribu kilometer atau terpanjang kedua didunia. Indonesia memiliki wilayah laut Indonesia yang sangat luas, mulai dari laut territorial, zona tambahan (contiguous zone), zona ekonomi eksklusif (ZEE) sampai dengan landas kontinen (continental shelf). Laut Indonesia, dianugerahi sumber daya alam yang sangat melimpah, baik sumber daya terbarukan (renewable resources) seperti perikanan, terumbu karang dan mangrove, maupun sumberdaya tak terbarukan (nonrenewable resources) seperti minyak bumi, gas, mineral dan bahan tambang lainnya.<sup>1</sup>

Konsep negara kepulauan (nusantara), kekayaan sumberdaya laut yang berlimpah, posisi strategis antara dua benua dan dua samudra yang menguntungkan secara geoekonomi dan geostrategi merupakan anugerah yang luar biasa bagi negara bangsa Indonesia. Letak geografis yang strategis, sedikitnya 70 persen angkutan barang kapal pesiar super mewah dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan sebaliknya melewati perairan Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> . Mina Bahari, *Laut masa depan Indonesia*, Jakarta: Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2014, hlm 9

<sup>2</sup> Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015, hlm 14

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki sektor maritim yang luas yang dikembangkan dengan baik sehingga dapat membantu negara untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik. Akan tetapi kekayaan alam dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak cukup hanya perlu dikembangkan dengan baik, tetapi juga harus selalu dijaga dengan baik agar selalu aman dan terlindungi oleh pemerintah Indonesia.

Karena ada beberapa permasalahan tentang laut dan kemaritiman di Indonesia yang mempunyai daya tarik bagi warga dan negara tetangga Indonesia, yang di antaranya adalah permasalahan batas wilayah laut. Wilayah bagian utara Indonesia yang dalam sejarahnya merupakan pintu masuk pengaruh budaya, interaksi ekonomi, migrasi penduduk, dan bahkan invasi dalam kerangka penguasaan politik ternyata justru banyak masalah perbatasan yang belum tuntas. Antara Indonesia dengan Singapura disepanjang Selat Malaka, misalnya, yang sudah disepakati adalah zona bagian tengah pada tahun 1973 yang membentang antara Batam dan Singapura dan zona tengah antara pulau Nipah (Indonesia) dan Tuas Bay (Singapura) pada tahun 2009. Sementara itu zona bagian timur antara Batam-Changi dan Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca belum dicapai kesepakatan.<sup>3</sup>

Selain itu, potensi konflik antara Indonesia dan Malaysia juga ada ketika menyangkut klaim wilayah seperti Blok Ambalat dan Sebatik. Potensi konflik juga bisa muncul antara Indonesia dan Vietnam karena klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tumpang tindih antara kedua negara disebelah utara

---

<sup>3</sup> "Indonesia-Singapura Tekan Penetapan Garis Batas Laut", Suara Karya, 23 Maret 2009

Kepulauan Natuna. Selanjutnya, antara Indonesia dengan Filipina pembicaraan mengenai batas-batas maritim juga belum tuntas, bahkan Filipina mengklaim Pulau Miangas sebagai bagian dari teritorinya.<sup>4</sup>

Permasalahan selanjutnya yang terjadi di wilayah laut Indonesia adalah praktek pencurian ikan (illegal fishing), potensi laut yang sedemikian besar yang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk mengelola dan penegakkan hukum atas kasus-kasus pelanggaran dilaut menjadikan Indonesia sebagai “surga” bagi nelayan asing. Berbagai modus dilakukan untuk dapat mencuri ikan di perairan Indonesia, misalnya berubahnya bendera kapal asing menjadi berbendera Indonesia dengan alasan terlibat “perkara” dengan pengusaha Indonesia sehingga kapal yang dijadikan jaminan diambil alih oleh pengusaha nasional melalui putusan pengadilan. Modus yang lain adalah memanipulasi ijin operasional kapal-kapal asing dengan memanfaatkan lemahnya aparat pemerintah dalam menegakkan aturan. Atau bahkan dengan modus yang kasar yaitu dengan secara sengaja kapal asing yang lebih canggih memasuki perairan Indonesia dan mencuri ikan diperairan Indonesia yang memang tidak dijaga dengan armada perang yang memadai. Persoalan semacam ini tidak lepas dari kurangnya perhatian pemerintah untuk mengagendakan secara serius penegakkan hukum di perairan Indonesia.<sup>5</sup>

Pada masa pemerintahan Indonesia saat ini dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo konsep dan kebijakan poros maritim secara eksplisit mulai diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat

---

<sup>4</sup> Indonesia Maritim Institut, *Konflik Batas Laut: Pertaruhan Harga Diri Bangsa*, 19 Agustus 2012, <http://indomaaritimeinstitute.org/?p=1341>, Diakses 25 Desember 2015 Pukul 10:45 AM

<sup>5</sup> I Basis Susilo, *Kemaritiman Indonesia*, Malang: Cakra Studi Global Strategis, 2015, hlm 115

internasional pada umumnya sebagai salah satu landasan politik luar negeri Indonesia. Kebijakan Poros Maritim Dunia yang dilontarkan Presiden Joko Widodo merupakan agenda dan misi Indonesia dalam beberapa tahun kedepan, dimana dalam kebijakan poros maritim tersebut Presiden Joko Widodo menekankan pendekatan terhadap pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Pendekatan terhadap tiga unsur tersebut telah tertuang pada lima pilar dari kebijakan Indonesia Poros Maritim Dunia yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo, dan lima pilar tersebut yaitu, pertama pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, yang kedua komitmen menjaga dan mengelola sumberdaya laut, ketiga komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, keempat diplomasi maritim, dan yang terakhir kelima membangun kekuatan pertahanan maritim.<sup>6</sup>

Dari lima pilar yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo diatas mengenai kebijakan poros maritim, bahwasannya penulis disini tertarik pada pendekatan ke empat yaitu tentang diplomasi maritim, yang dimana dari diplomasi maritim ini bertujuan mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama pada bidang maritim. Semua mitra Indonesia ini menyangkut beberapa negara yang merupakan mitra Indonesia, termasuk negara-negara ASEAN yang berada dekat dari Indonesia.

Ketegasan hukum dan beberapa kebijakan tentang kawasan territorial Indonesia di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini agar bisa melindungi SDA dari sektor laut khususnya, karena masih banyak SDA

---

<sup>6</sup> Antara News, *Jokowi Beberkan Lima Pilar Poros Maritim*, [Online], tersedia: <http://www.antaranews.com/berita/464097/di-eas-jokowi-beberkan-lima-pilar-poros-maritim-dunia>, 13 November 2014, Diakses pada tanggal 4 November 2015 pukul 14:25 AM

Indonesia dilaut yang masih belum dimaksimalkan oleh Indonesia. Karena potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan mencapai Rp7.200 triliun per tahun atau enam kali lipat dari APBN 2011 (Rp1.299 triliun) dan satu setengah kali PDB saat ini (Rp5.000 triliun).<sup>7</sup> Dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi negara maritim yang mampu memaksimalkan potensi kelautannya.

Keseriusan Presiden Joko Widodo yang pertama untuk memajukan Indonesia adalah dengan rencana pembangunan jalan tol laut, yang dimana pembangunan tol laut ini untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim agar dapat memperlancar laju perekonomian di Indonesia, yang mana wilayah Indonesia merupakan pulau-pulau yang terpisah antara satu dengan yang lainnya, untuk itulah supaya bisa memperlancar laju perekonomian di Indonesia diperlukan suatu penghubung antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya dengan pembangunan tol laut tersebut.

Kebijakan atau peraturan (yang terdapat dalam UU No.31 tahun 2004 yang di rubah kedalam UU No.45 tahun 2009 tentang perikanan, Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan, tentang penenggelaman kapal asing) yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk meledakkan kapal asing yang terbukti menangkap ikan secara ilegal di Indonesia merupakan pilihan yang tepat, karena setelah kebijakan tersebut dilaksanakan terbukti cukup ampuh, karena telah berhasil mengusir 90% kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia.

---

<sup>7</sup> Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015, hlm 1

Berdasarkan data KKP, jumlah kapal asing (termasuk kapal asing milik Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina) yang berada diperairan Indonesia pada awal 2014 tercatat 1.128 unit. Kemudian pada akhir Desember 2014, jumlah tersebut turun menjadi 164 unit. Jumlah kapal asing tersebut terdeteksi oleh sinyal Vessel Monitoring System (VMS) berdasarkan ketentuan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 10 tahun 2013 tentang pemantauan Sistem Kapal Perikanan.<sup>8</sup>

Ketegasan hukum yang diberikan terhadap para pencuri ikan ilegal di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, dirasa mampu memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan tersebut. Hal ini terbukti dengan berkurangnya kapal-kapal ilegal asing setelah pemerintah menyatakan dengan tegas mengancam akan menenggelamkan kapal mereka. Berikut tabel penenggelaman kapal asing oleh pemerintah Indonesia yang telah terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) diperairan Indonesia.

Tanggal	Asal Negara	Jumlah Kapal	Lokasi Penenggelaman
5 Desember 2014	Vietnam	3	Diperairan Anambas
9 Februari 2015	Thailand	1	Diperairan kepulauan Riau
20 Mei 2015	China, Thailand, Vietnam	6	Diperairan Pulau Datok Kabupaten Mempawah
18 Agustus 2015	Thailand	4	Lanai Terempa, Lanal Rinai, dan Lantamal Tarakan
	Filipina	3	
	Vietnam	4	
	Malaysia	1	

Tabel. Penenggelaman kapal milik negara anggota ASEAN.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Hanna Azarya Samosir, *Pencurian Ikan*, CNN Indonesia, Diakses dari <https://jakarta45.wordpress.com/tag/maritime/page/2/>, Pada tanggal 25 September 2015 Pukul 2:18 AM

<sup>9</sup> "Penenggelaman Kapal Asing Ilegal", Tribun News, Diakses dari <http://www.tribunnews.com/tag/penenggelaman-kapal-asing-ilegal>, Pada tanggal 26 Desember 2015 Pukul 11:59 PM

Keberhasilan yang telah dicapai pemerintah Indonesia dalam menangani sektor lautnya melalui kebijakan yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo tentu akan berpengaruh terhadap negara-negara sekitar, khususnya negara tetangga Indonesia dimana kebanyakan adalah anggota dari ASEAN. ASEAN merupakan organisasi regional di Asia Tenggara yang terdiri dari bangsa-bangsa Asia Tenggara, dimana Indonesia sendiri sebagai anggota pertama terbentuknya ASEAN ini.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Indonesia diatas dalam menangani permasalahan yang berada di laut territorial Indonesia, maka penulis berpendapat bahwasannya negara lain juga menghormati atas peraturan dan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan Indonesia, karena peraturan dan kebijakan tersebut merupakan kedaulatan dari negara Indonesia. Pendapat ini juga dibuktikan dengan adanya tanggapan dari beberapa negara disekitar Indonesia, khususnya yang merupakan anggota dari ASEAN (karena mereka adalah merupakan negara terdekat Indonesia), terkait peraturan dan kebijakan yang telah diberlakukan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

Pemaparan dari negara tetangga Indonesia yang sekaligus merupakan anggota dari ASEAN terkait peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan Indonesia dalam menjaga SDA dan kedaulatannya. Salah satu pemaparan tersebut diantaranya yaitu dari Negara Malaysia, dimana Malaysia ini merupakan negara tetangga dan salah satu anggota dari ASEAN. Pemaparan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri

Zahrain Muhamad Hasyim, mengaku pemerintahnya menerima kebijakan Indonesia menenggelamkan kapal asing ilegal yang ketahuan mencuri ikan di perairan Indonesia. “Jelas kita sebagai negara yang berdaulat, menghargai hukum di negara masing-masing,” kata Datuk Seri Zahrain Muhamad Hasyim kepada wartawan usai menemui wakil Presiden Jusuf Kalla dikantor wapres Jakarta Pusat.<sup>10</sup>

Dimasa pemerintahan Indonesia saat ini, dalam konteks ASEAN kebijakan poros maritim mulai diperkenalkan dan mendapatkan sambutan yang baik dari negara anggota ASEAN. Indonesia mengajak negara anggota ASEAN untuk secara bersama-sama menjalin kerjasama dalam bidang kemaritiman, dimana kerjasama tersebut bisa dilakukan melalui kerjasama dalam bidang pengamanan wilayah kedaulatan masing-masing negara diperbatasan perairan masing-masing, serta meningkatkan diplomasi ekonomi antar negara ASEAN yang dilakukan melalui kerjasama regional dan internasional, yang akan ditingkatkan di bidang infrastruktur maritim, energi, perikanan dan pelestarian lingkungan bahari. Pada tingkat bilateral, kerjasama maritim juga akan dikembangkan dalam kerangka kemitraan strategis dan komprehensif dengan negara sahabat.<sup>11</sup>

Penulis tertarik pada judul ini “Diplomasi Maritim Indonesia di ASEAN Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Tahun 2015”, karena untuk

<sup>10</sup> Nurmulia Rekso Purnomo, *Dubes Malaysia Hormati Pemerintah Indonesia Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal*, Tribun Nasional, Diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/03/12/dubes-malaysia-hormati-pemerintah-indonesia-tenggelamkan-kapal-asing-ilegal>, Pada tanggal 27 Desember 2015 Pukul 2:06 AM

<sup>11</sup> Yuni Arisandy, *Tiga Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia*, Antara News, Diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/472906/ini-tiga-prioritas-politik-luar-negeri-indonesia>, Pada tanggal 27 Desember 2015 Pukul 4:38 AM



mengetahui sejauh mana respon ASEAN terhadap kebijakan poros maritim Indonesia. Serta pendekatan dan Diplomasi seperti apa yang dilakukan Indonesia terhadap ASEAN, supaya Indonesia bisa bekerjasama dengan Negara ASEAN dalam sektor maritim.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari pembahasan dan latar belakang yang sudah dibahas diatas, penulis menemukan beberapa pokok permasalahan dalam pembahasannya, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan poros maritim Indonesia?
2. Bagaimana respon ASEAN terhadap pendekatan diplomasi Poros Maritim Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan poros maritim Indonesia.
2. Bagaimana pandangan dan respon ASEAN terhadap kebijakan poros maritim Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dilihat dalam dua bagian yaitu secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk pengembangan keilmuan di bidang ilmu hubungan internasional

- b. Untuk menambah wawasan dalam ilmu hubungan internasional tentang “Diplomasi Maritim Indonesia dan Respon dari ASEAN”

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengambil kebijakan dan pemangku kebijakan di kawasan ASEAN tentang kebijakan poros maritim Presiden Joko Widodo.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima Bab, yaitu:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan permasalahan, manfaat dan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dan sistematika penulisan skripsi ini.

### BAB II : KERANGKA TEORI

Berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan poros maritim Indonesia serta respon ASEAN terhadap Diplomasi Maritim Indonesia.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, spesifikasi penelitian, jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik analisa.

### BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di uraikan apasaja kebijakan poros maritim yang sedang dilakukan Indonesia, serta pendekatan apa saja yang akan dilakukan Indonesia dalam diplomasi poros maritim tersebut. Kemudian bagaimana tanggapan dari ASEAN tentang kebijakan-kebijakan dan diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam sektor maritim tersebut.

BAB V : KESIMPULAN

Merupakan bab terakhir dari proses penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

